

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASASAN KOPERASI OLEH DINAS
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDARAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh :

PUTRA YOGA

NIM. 11527104863

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG*, yang ditulis oleh :

Nama : **Putra Yoga**
 NIM : 11527104863
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 06 Januari 2020**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji II
Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *“Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Dikabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang”*

Nama : PUTRA YOGA
 NIM : 11527104863
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2019

Pembimbing Skripsi

Muslim, S.Ag, SH, M.Hum
19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG”**. merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada :

- Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu Arifin (Ayahanda) dan Yusmida (Ibunda) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan saya semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi saya, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahalamu menuju surga.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
Bapak Dr. Hajar Hasan, MA selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
Bapak Firdaus, SH, MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU
Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Asril, S.HI, MH selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.

Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi.

Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.

9. Buat adikku Rio Pranata, dan Sepupu-sepupuku Hudri saputra, Siti Habibah, Farnita Fardela, Irma Indana Zulfa, Nofitri Handayani, Nurfadilah Syahwa, Dio Atala Tipandra Putra, Muhammad Rasyidik, Firman Husada, dan juga seluruh Keluarga Besar Datuk H. Udin Anwar yang telah memberikan semangat dan mendorong saya untuk tetap terus berjalan mengejar cita-cita. Buat teman-teman seperjuangan ku , Martang, Zulkifli, Zainal Hakim, Darmansyah, Boy Trie Ardianto, Tio Prasetio, Ardiansyah Dewa, Ade Setiawan, Ilhamsyah, Riska Amalia, Nurliani Aprila, Delvi Elvita, Daniaty Fitri, Mizda Pooja Delsoon dan Reni Rahmawati yang selalu memberikan support, dukungan, dan bantuan yang tak henti-hentinya buat kelancaran penyelesaian skripsi ini dan terima kasih telah memberikan semangat dan doanya selama ini. Dan Terima kasih buat teman-teman Ilmu Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

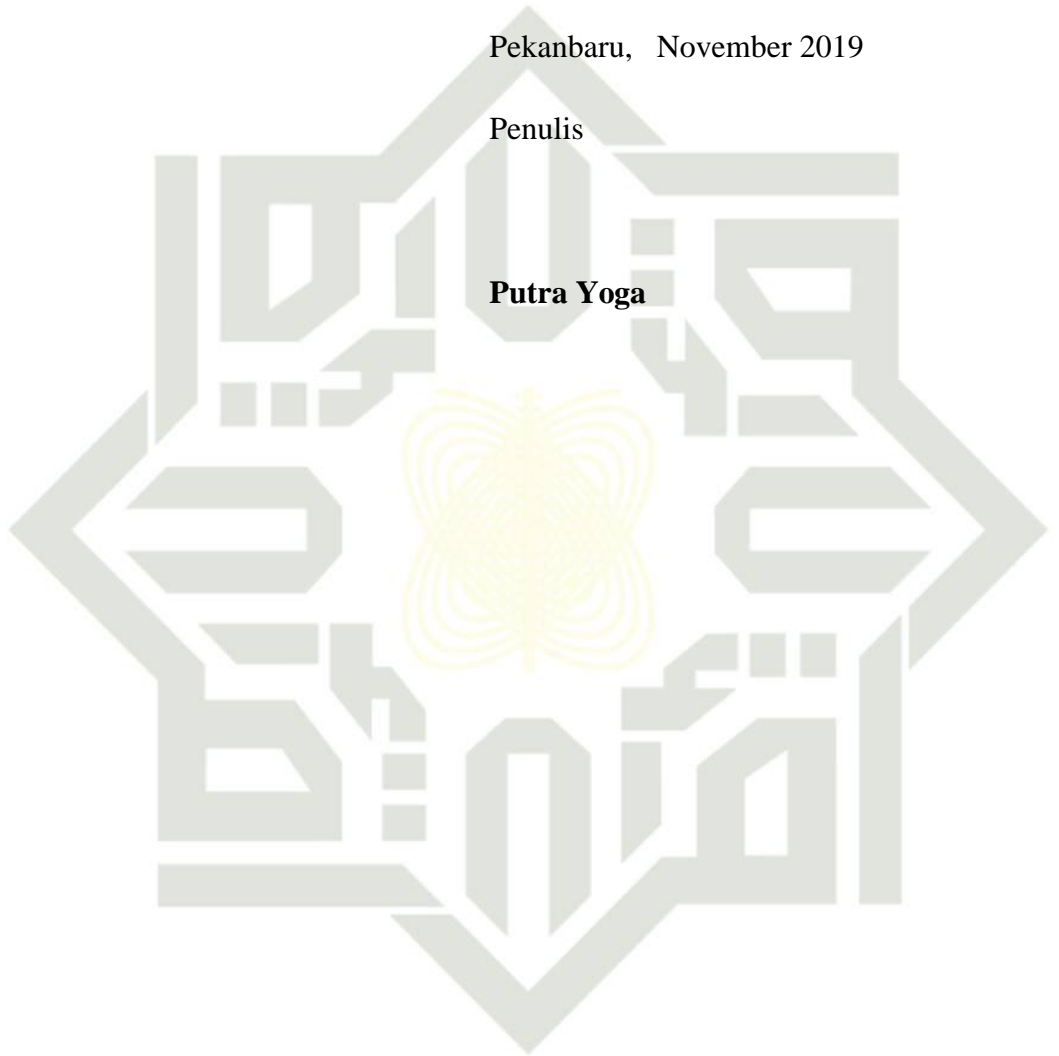
angkatan 2015 Terima kasih atas suka dan duka, canda tawa yang sebesar-besarnya, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Putra Yoga



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	21
B. Gambaran Umum Kecamatan Keritang	25
C. Gambaran Umum Dinas Koperasi	31
BAB III TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Dinas Koperasi	37
B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang?	52
B. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang?	60
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Table I.1 Data Jumlah Koperasi	10
Table I.2 Populasi dan Sampel	16
Table II.1 Sarana Ibadah	30
Table II.2 Sarana Pendidikan	31



ABSTRAK

**Putra Yoga (2019) : Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di
Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang.**

Pengawasan koperasi adalah untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan koperasi, baik segi organisasi, usaha administrasi maupun keuangan. Berdasarkan observasi dari penulis di lapangan terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan fakta di lapangan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun para kepengurusan koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang Serta Faktor Penghambat pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi serta faktor penghambatnya diindragiri hilir kecamatan keritang.

Jenis penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis), sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini langsung ke lokasi pada ketua koperasi dan Badan Pengawas Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara serta kajian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Dari hasil penelitian ini tentang Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang masih tidak sesuai antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan, dikarenakan koperasi tidak dalam pengangkatan kepengurusan hanya berdasarkan kesepakatan orang-orang tertentu saja yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian yang menjadi faktor terkendalanya pengawasan oleh pihak dinas koperasi yaitu kurangnya sumber daya manusianya yang lemah kemudian peletakan tugas staf yang tidak sesuai pada keahliannya, selanjutnya juga Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta Kurangnya sanksi dan pengawasan sebagai efek jera bagi para pengurus koperasi yang tidak berjalan sesuai peraturan. Karna faktor-faktor tersebut maka akan berdampak kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peranan penting di dalamnya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia pastilah melakukan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam melakukan usaha bekerja tersebut manusia dapat secara sendiri atau melakukannya melalui badan hukum (*recht person*). Keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum karena perkembangan zaman, subyek hukum perorangan tersebut berkumpul atau bersatu dan membentuk suara organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut badan hukum (*recht person*). Dengan dasar pembentukan diatas, maka badan hukum disebut juga sebagai subyek hukum tidak alamiah.²

Kemudian tentang koperasi dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang berarti bekerja bersama

¹ R Z. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Radjawali Pers: Jakarta, 2008), hlm. 3.

² Sudikmoneertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 1986), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.³ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah Organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴ Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan nya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵ Kemudian definisi koperasi yang diberikan oleh *Dr. Fay* (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota.⁶

Dalam suatu kepemimpinan banyak dipertanyakan, jenis atau gaya kepemimpinan manakah yang cocok buat koperasi? Sebagaimana kita ketahui kita mengenal 3 gaya kepemimpinan, yaitu :⁷

- 1) Otoriter
- 2) Demokratis
- 3) Kebebasan

³ Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (UIN-Maliki Press: Malang, 2013), hlm. 1.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

⁵ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁶ Hendrojogi, *Koperasi:Asas-Asas, Teori Dan Praktik*,(PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), hlm. 20.

⁷ *Ibid*, hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari segi prinsip koperasi yaitu salah satunya adalah pengawasan dilakukan secara demokratis,⁸ itu artinya suatu pengawasan harus berjalan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat ciri-ciri koperasi dimana dalam demokrasi merupakan salah satu unsur yang terkandung dalam organisasi koperasi maka dapat dipastikan bahwa gaya demokratis lah yang tepat bagi kepemimpinan dalam koperasi. Sifat dari kepemimpinan yang demokratis tersebut diantaranya dilihat pada Rapat Anggota, dimana para anggota diajak serta membicarakan dan memutuskan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan memberikan penilaian tentang kinerja dari pengurus dalam satu tahun dengan satu anggota satu suara, dan sebagainya.

Koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ada beberapa perangkat dalam organisasi dalam yaitu Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi.¹⁰ Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

⁸ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik*, (Alfabeta: Bandung , 2015), hlm 23-

⁹ Sudarsono dan Edilius, *Managemen Koperasi Indonesia*, (Bineka Cipta: Jakarta, 2001), hlm. 5.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

didalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, sehingga sering disebut Rapat Anggota Tahunan, namun jika keadaan mengharuskan diadakannya rapat khusus atau rapat istimewa diluar rapat anggota tahunan tersebut maka demi kepentingan bersama dalam koperasi hal tersebut dapat dilaksanakan, rapat ini sering disebut juga dengan istilah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang mana rapat ini dapat diadakan atas usul/permintaan dari sejumlah anggota koperasi kepada pengurus koperasi atau atas keputusan dari pengurus koperasi itu sendiri.¹²

Sedangkan pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab nya dan keputusan rapat anggota.¹³

¹¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 81.

¹² *Ibid*, hlm. 82.

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus diberi kuasa atas persetujuan dalam rapat anggota untuk mengangkat tenaga pengelola/manager yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha koperasi tersebut. Pengelola atau manager ini diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus yang besarnya ditentukan dengan kepentingan koperasi, dengan demikian pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang dimilikinya karena sudah dilimpahkan kepada pengelola atau manager.¹⁴

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota koperasi dalam Rapat Anggota serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian pengawas koperasi tidak dibenarkan diangkat dari orang diluar koperasi. Tugas pengawas koperasi ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus koperasi dan hasil pengawasannya tersebut akan dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis.

Mengenai tugas dan wewenang pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 diatur dalam Pasal 39 yaitu :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- d. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; dan
- e. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

¹⁴ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.Cit*, hlm. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan umum dari pengawasan koperasi adalah untuk memberikan informasi yang sebenarnya tentang keadaan koperasi, baik segi organisasi, usaha administrasi maupun keuangan serta untuk memberikan saran dalam rangka mencapai tujuan koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditentukan dan tujuan khusus dari pengawasan koperasi yaitu :

1. Untuk meneliti kebenaran pembukuan dan kelayakan laporan keuangan;
2. Menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengurus dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi;
3. Menilai seberapa jauh hasil yang dicapai dibandingkan dengan pencapaian tujuan;
4. Mengamankan atau menyelamatkan kekayaan koperasi, anggota, atau pihak yang terkait;
5. Mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di koperasi.

Apabila laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi atau mempunyai pendapat lain, maka untuk penyelesaian nya pengurus tidak diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas. Dia hanya berhak dan wajib memberi keterangan tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas. Jika ternyata tidak juga ada titik temu antara pengurus dan pengawas koperasi tersebut maka keputusan akhir diserahkan kepada rapat anggota untuk menilai dan memberikan keputusan.¹⁵ Dalam kondisi yang seperti ini sangat diperlukan saran, pandangan

¹⁵ Ibid, hlm. 92-93.

dan pendapat dari pejabat koperasi selaku pembina, sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tersebut.

Pada dasarnya kedudukan pengawas dan pengurus sejajar, tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda pengurus dan pengawas sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota, dalam prakteknya di Indonesia bahwa sering kali kita jumpai koperasi yang mana pengurus koperasi yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang tugas dan wewenang pengurus dan pengawas koperasi.

Bahkan dalam pelaksanaannya bahwa pengurus koperasi sering kali dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bertindak sesuai kehendak pengurus koperasi sendiri. Pengawasan yang dibentuk atas dari dan oleh anggota tidak bekerja sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam undang-undang. Ruang gerak pengawas selalu dibatasi oleh pengurus koperasi sehingga dalam prakteknya di Indonesia pengawas koperasi hanyalah sebagai catatan struktural, karena jalannya roda perkoperasian hanya diketahui oleh pengurus koperasi, bahkan anggota koperasi pun hanyalah sebagai penonton jalannya roda perkoperasian.

Karena dalam prakteknya anggota tidaklah berperan aktif dalam perkembangan koperasi, hanya beberapa saja yang aktif dalam perkoperasian dan mengetahui perkembangan usaha koperasi, mereka adalah mereka yang menanamkan modalnya dalam usaha koperasi dan pengurus koperasi, jadi pembagian sisa hasil usahanya pun diberikan kepada mereka yang menanamkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modalnya di koperasi berikut para pengurus koperasi yang menjalankannya usaha tersebut.

Sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum (*recht person*), koperasi haruslah disertai dengan pengawasan oleh pemerintah yang bergerak dalam lingkup Koperasi dan UKM yaitu Dinas Koperasi untuk bagian daerah kabupaten agar suatu badan usaha tersebut bisa berjalan dengan baik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2015 berbunyi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pengawasan yang dilakukan disebut sebagai pemeriksaan yang berarti pemeriksaan yang berhadapan langsung dengan objek yang diperlukan, yang menjadi acuan kegiatan pengawasan adalah rencana, program kerja, prosedur atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya diuangkan dalam bentuk perundang-undangan baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan dirjen maupun lain sebagainya.¹⁷

Dilihat dari segi tugas tentang pengawasan tugas dinas perkoperasian adalah Seksi penilaian dan pengawasan koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan pengawasan serta melaksanakan kegiatan penilaian

¹⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi.

¹⁷ Iin Kumira Sari, *Tentang Pengawasan*, Jurnal Hukum, Pekanbaru, 2013, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi. Penjabaran tugas seksi penilaian dan pengawasan koperasi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana teknis penilaian kesehatan, pemeringkatan koperasi dan pengawasan penyelenggaraan bagi koperasi;
2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian kesehatan dan kelayakan usaha terhadap koperasi;
3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan terhadap koperasi penerima dana bergulir atau fasilitas pembiayaan baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan hasil penilaian kesehatan dan pengawasan koperasi;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sebagaimana kita ketahui, pengawas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), yang umumnya diadakan setahun sekali oleh koperasi memberikan laporan evaluasi tentang kebijaksanaan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pengurus selama tahun buku yang bersangkutan. Tetapi disamping itu pengawas dapat sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pengurus dalam satu kurun waktu tertentu, yang biasanya dilakukan 3 bulan sekali, seperti yang dilakukan oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri.

¹⁸ <http://info.metrokota.go.id/dinas-koperasi-umkm-dan-perindustrian/>, diakses, pukul 09:55, Tanggal 28 Maret 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1

Laporan dari Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2019

Status	Aktif	Non Aktif	Total
Jumlah	249	128	377

Sumber : Dinas Koperasi Kab.Indragiri Hilir

Beberapa bagian koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir menurut laporan dari Dinas Koperasi dan UKM Indragiri Hilir tahun 2019 seperti berikut :

1. 249 koperasi yang aktif
 - 1) 50 koperasi dinyatakan aktif yang sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Artinya telah mengadakan RAT dan laporan dari pengurus koperasinya telah masuk ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir
 - 2) 199 koperasi yang aktif namun koperasinya tidak mengadakan RAT dan sumber daya manusianya (SDM) kurang, serta kepengurusan koperasinya kurang aktif yang mana usaha koperasinya tidak berjalan.
2. 128 koperasi yang tidak aktif
 - a. 33 koperasi yang masih belum adanya laporan dari pengurus koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir. Artinya belum mengadakan RAT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. 95 koperasi telah diwacanakan untuk dibubarkan karena koperasi dianggap sudah tidak berjalan dan serta kepengurusannya pun sudah tidak ada

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi yang benar-benar berjalan sesuai dengan undang-undang hanya berkisar 20% yang aktif secara usahanya dan kepengurusan koperasi nya.

Data koperasi di Kecamatan Keritang

1. 28 koperasi yang aktif
 - a. 3 koperasi dinyatakan aktif yang sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Artinya telah mengadakan RAT dan laporan dari pengurus koperasinya telah masuk ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir
 - b. 25 koperasi yang aktif namun koperasinya tidak mengadakan RAT dan sumber daya manusianya (SDM) kurang, serta kepengurusan koperasinya kurang aktif yang mana usaha koperasinya tidak berjalan.
2. 11 koperasi yang tidak aktif
 - a. 5 koperasi yang masih belum adanya laporan dari pengurus koperasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir. Artinya belum mengadakan RAT.
 - b. 6 koperasi telah diwacanakan untuk dibubarkan karena koperasi dianggap sudah tidak berjalan dan serta kepengurusannya pun sudah tidak ada

Berdasarkan data dari 39 koperasi yang ada di Kecamatan Keritang hanya diperoleh 28 koperasi yang aktif dan hanya 3 koperasi yang mengadakan RAT, dapat disimpulkan dari penjelasan diatas hanya berkisar 20% yang aktif secara usahanya dan kepengurusannya. Disini sudah jelas dalam pembentukan dan pengangkatan pengurus koperasi harus lah melalui rapat anggota, Namun fakta di lapangan masih banyak koperasi yang melakukan pengangkatan pengurus koperasi berdasarkan kesepakatan orang-orang tertentu saja tanpa melalui rapat anggota. Kemudian banyaknya koperasi yang tidak menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) masih banyaknya pengawas yang tidak melakukan laporan tertulis terhadap anggota. Kemudian banyaknya pengawas yang tidak mengetahui tugas dan wewenang pengawas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Disini sangat diperlukannya pengawasan dari Dinas Koperasi yang selaku perwakilan tugas dari pemerintahan pusat untuk mengawasi dan memberikan arahan atau pembinaan kepada koperasi di daerah-daerah, namun yang terjadi di lapangan Dinas koperasi tidak pernah turun kelapangan langsung untuk mengawasi dan mencari keterangan lain tentang berjalannya koperasi sesuai dengan undang-undang, Dinas Koperasi hanya menilai bahwa suatu koperasi itu berjalan sesuai dengan undang-undang apabila suatu organisasi koperasi tersebut telah mengumpulkan laporan tahunan kepada Dinas Koperasi tersebut. Menurut penulis disini terjadi ketidakseimbangan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2015 dengan fakta dan realita dilapangan tentang tugas dan wewenang pejabat yang membidangi koperasi yaitu Dinas Koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sosiologis yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengurus Koperasi oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang"**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada pembahasan pelaksanaan pengawasan terhadap pengurus koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang.
- 2) Untuk mengetahui apa faktor penghambat pelaksanaan pengawasan koperasi di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang.

2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian adalah :

- 1) Untuk salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- 3) Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau *Methodology of research* berasal dari kata *metode* yang berarti cara atau teknik dan *Logos* yang berarti ilmu. Sehingga metodologi penelitian ini berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.¹⁹

¹⁹ Jusuf Soewdji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Witra Wacana Media: Jakarta, 2012), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan sistem penelitian sosiologis atau penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data-data berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya itu bersifat data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kejanggalan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²¹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Ketua koperasi;
- b) Badan Pengawasan Dinas Koperasi Indragiri Hilir;

Tabel I.2

Populasi dan sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Ketua Koperasi	39	5	11%
2	Badan pengawas Dinas Koperasi	4	3	79%
JUMLAH		43	8	21%

²¹ Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2011), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan dengan obeservasi, maupun wawancara langsung dengan pihak Dinas Koperasi Indragiri Hilir serta Ketua Koperasi yang ada di Kecamatan Keritang guna memperoleh data yang berhubungan dengan data yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan keputusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian atau yang sering disebut dengan bahan hukum.²² Data berupa bahan-bahan pustaka, misalnya buku-buku, undang-undang, peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai litelatur yang dikelompokkan kedalam:

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto acmad, *Dualise Penelian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar : Yogyakarta, 2010) hlm. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang tentang Koperasi, Pemerintah Daerah Yurisprudensi seperti pendapat para ahli
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku Perkoperasian, HTN, Kelembagaan, Pengawasan, Jurnal Hukum, Surat kabar (koran), Pamphlet, Brosur dan Berita Internet.
- c) Bahan hukum tersier, suatu kumpulan dan kompilasi penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Hukum, ensiklopedia, dll.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi merupakan mengumpulkan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Dalam penelitian wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada ketua koperasi serta badan kepengawasan dinas koperasi yang turut andil dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Kabupaten Indragiri Hilir, sejarah koperasi serta tantang dinas koperasi, struktur dinas koperasi dan visi misi dinas koperasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN UMUM

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum koperasi, tinjauan tentang dinas koperasi, teori tentang pengawasan, tinjauan umum tentang pengawasan dinas koperasi.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta faktor penghambatnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Gambaran umum lokasi penelitian yang dibahas dalam penelitian ini antara lain kondisi geografi Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Keritang, jumlah penduduk berdasarkan kelamin, Agama dan Pendidikan di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan meliputi :

- 1) Kecamatan Batang Tuaka;
- 2) Kecamatan Concong;
- 3) Kecamatan Gaung;
- 4) Kecamatan Gaung Anak Serka;
- 5) Kecamatan Kateman;
- 6) Kecamatan Kempas;
- 7) Kecamatan Keritang;
- 8) Kecamatan Kuala Indragiri;
- 9) Kecamatan Mandah;
- 10) Kecamatan Pelangiran;
- 11) Kecamatan Pulau Burung;
- 12) Kecamatan Tanah Merah;
- 13) Kecamatan Teluk Balengkong;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Kecamatan Tembilahan;
- 15) Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
- 16) Kecamatan Tempuling.

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 (LN RI Nomor 49).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dipantai timur pulau sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Jembatan” yang sekarang terkenal sebagai “NEGERI SERIBU PARIT” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa, dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. 0 36’ Lintang Utara, 1 07’ Lintang Selatan, 104 30’ Bujur Timur, 102 30’ Bujur timur.

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Pelalawan
- b. Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
- c. Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian besar dari luas wilayah atau 92,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas

pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut sedangkan sebagian kecilnya 6.69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian Selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa Sungai Belah, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok. Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan Sungai Batang Tumu. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya. Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau /burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air tawar, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Njiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping itu gugusan pulau tersebut maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti: Selat/Terusan Kempas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selat/Terusan batang, Selat/Terusan Concong, Selat Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain : Terusan Beringi, Terusan Igal, dan lain-lain. selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Kabupaten Indragiri Hilir menyimpan potensi besar dalam berbagai sektor perekonomian, terutama dibidang Perkebunan, Perikanan/kelautan, dan Perindustrian dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Disektor Perkebunan, beberapa komoditi unggulan adalah kelapa lokal, kelapa hibrida, kelapa sawit dan sagu. Kabupaten Indragiri Hilir terbagi 20 Kecamatan, 174 Desa dan 18 Kelurahan. Kota tembilahan yang terletak dikecamatan Tembilahan merupakan Ibukota Indragiri Hilir dibangun diatas tanah berawa, yang dialiri Sungai Indragiri merupakan urat nadi jalur perhubungan air. Kuala enok merupakan kota pelabuhan yang berpotensi menjadi sentra industri kelapa, yang dahulunya hanya ditempuh menggunakan transportasi air sekarang telah dapat ditempuh melalui jalur darat karena telah dibukanya jalan darat sebagai akses menuju pelabuhan samudera. Sungai Guntung di Kecamatan Kateman adalah tempat lainnya yang menarik untuk dijadikan sentra perdagangan dan industri terdapat empat pelabuhan laut dan sungai yang berorientasi Ekspor-Import, yaitu pelabuhan : Kuala Enok, Kuala Gaung, Sungai Guntung dan pelabuhan parit 21 Tembilahan. Dari bagian selatan daerah ini, jarak ke Batam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Singapura bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam dengan menggunakan speed boat. Untuk lalu lintas Ekspor-Impor tersedia kapal-kapal lintas negara dengan tujuan pelayanan keberbagai pelabuhan penting didunia, khususnya Asia dan Eropa.

Kabupaten Indragiri Hilir juga memiliki Bandar Udara, yaitu bandara Tempuling yang telah diuji coba dan telah di operasikan melayani keberangkatan jemaah haji menuju Batam. Nantinya bandara Tempuling dioperasikan melayani rute penerbangan regional sehingga membuat daerah ini makin mudah diakses sebagai pintu gerbang riau menuju kenchah Ekonomi Global. Sebagai sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam, dan menyimpan berbagai potensi ekonomi, Kabupaten Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan dimasa depan. Didukung letak geografis yang strategis, serta ditunjang tersedianya berbagai infrastruktur dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan, daerah ini merupakan daerah investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global. Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, Pemerintah Daerah telah membangun berbagai infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses dari dan keluar Kabupaten Indragiri Hilir, baik melalui jalur darat, laut maupun udara, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif yang mempermudah sektor swasta untuk menjadi pelaku bisnis didaerah ini.

B. Gambaran Umum Kecamatan Keritang

Desa Kotabaru adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tahun 1981 desa Kotabaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimekarkan menjadi kecamatan dengan nama Kecamatan Keritang dengan Ibukota kecamatannya adalah Kotabaru dengan mempunyai wilayah sebanyak 19 desa. Pemekaran tersebut didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1981 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 376/Tahun 1997 tanggal 29 Juli 1997 dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: 82/U/HK-2001 tanggal 25 Mei 2001 bahwa desa Selensen yang merupakan desa wilayah Kecamatan Keritang dimekarkan menjadi kecamatan dengan nama Kecamatan Kemuning dengan Ibukota Selensen dan mempunyai wilayah 11 desa dan Kecamatan Keritang memiliki 13 desa yaitu:

- 1) Pebenaan;
- 2) Seberang Pebenaan;
- 3) Kotabaru ReteH;
- 4) Nusantara Jaya;
- 5) Kotabaru Seberida;
- 6) Kembang Mekar Sari;
- 7) Pasar Kembang;
- 8) Kuala Keritang;
- 9) Kuala Lemang;
- 10) Pengalihan;
- 11) Teluk Kelasa;
- 12) Pancur; dan
- 13) Sencalang.

Kemudian pada tahun 2012 terjadi lagi pemekaran desa sebanyak 4 desa yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Desa Lintas Utara adalah pemekaran dari desa Nusantara Jaya
- Desa Nyiur Permai adalah pemekaran dari desa Teluk Kelasa
- Desa Petalongan adalah pemekaran dari desa Sencalang
- Desa Kayu Raja adalah pemekaran dari Kelurahan Kotabaru Reteh

Jumlah desa wilayah Kecamatan Keritang pada tahun 2012 berjumlah menjadi 17 desa. Selama terbentuknya Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai camat sebagai berikut:

- Drs. A. Hamid Idris (11.12.1980 – 16.10.1981)
- Nazarudin, Ba (16.10.1981 – 26.05.1983)
- Drs. M. Fikri Mursyid (26.05.1983 – 22.01.1985)
- Drs. Jailani Sabrah (22.01.1985 – 16.11.1985)
- Drs. Ahmad (16.11.1985 – 16.10.1986)
- Drs. Subroto (16.10.1986 – 03.05.1989)
- Drs. Ilyas Harun (03.05.1989 – 05.02.1996)
- Drs. Said Ismail (05.02.1996 – 22.03.2003)
- Drs. Darussalam (22.03.2003 – 27.12.2004)
- Yun Hawarius, S.Sos (27.12.2004 – 11.10.2010)
- Ahmad Ramani, Mpd (11.10.2010 – 27.02.2014)
- Zulfahri, S.Ip, M.Si (27.02.2014 – 09.03.2015)
- Hadi Irianto (11.03.2015 – 09.04.2016)
- Ridwan, S.Sos, M.Si (09.04.2016 – 20.07.2017)
- Hadi Rachman, S.Sos, M.Si (20.07.2017 S/d sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi merupakan gambaran keadaan yang dibayangkan dapat atau ingin dicapai atau diwujudkan pada masa mendatang, merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelola lembaga. Penyerahan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh lembaga dan kegiatan spesifikasi apa yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh lembaga untuk pencapaian visi.

Adapun visi Kecamatan Keritang yaitu: **“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Didukung Oleh Sumber Daya Aparatur dan Sumber /Daya Alam Yang Mandiri, Agamis, Sejahtera, Lahir Batin”.**

Adapun pernyataan misi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

- a. Mengoptimalkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada publik yang meliputi jangkauan mutu;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing menguasai ipteq dan imtaq;
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) guna mengakses hubungan antar desa, dengan mengupayakan peningkatan ruas jalan dan jembatan antar desa, menjadi jalan penunjang atau jalan kabupaten;
- d. Mewujudkan swasembada pangan peningkatan usaha sektor perkebunan sebagai andalan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur pedesaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pelayanan jasa; dan
- f. Mewujudkan pemberdayaan generasi muda melalui penyiapan lapangan kerja, seni dan budaya.

Kecamatan Keritang berada dibagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan mempunyai penduduk sangat homogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa melayu, bugis, jawa, minang, banjar, batak. Dan mereka hidup berdampingan dengan rukun damai saling menghormati dan saling menghargai satu dengan lainnya. Mayoritasnya penduduk Kecamatan Keritang mempunyai mata pencarian dengan berkebun dan berdagang bagi penduduk pendatang.

Kemudian Agama dan Pendidikan Kecamatan Keritang :

a. Agama

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting untuk dipenuhi, dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, karena tanpa agama manusia terombang-ambing oleh kehidupan tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan hidup untuk mendapatkan kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat nantinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kecamatan keritang bahwa masyarakat yang ada di kecamatan Keritang beragama Islam, tidak ada penduduk tersebut yang beragama non-Islam.

Dengan banyaknya penduduk Kecamatan Keritang yang beragama Islam juga didukung oleh tempat atau sarana ibadah yang juga memadai dan cukup banyak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Sarana Ibadah di Kecamatan Keritang

No	Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	80
2	Musholla	33
3	Surau	85
Jumlah		198

Sumber: kantor camat keritang tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat kecamatan Keritang cukup baik dalam bidang keagamaan, walaupun berbeda suku dan asal daerah mereka namun penduduk bisa bersama-sama dalam mengembangkan dan menjalankan ajaran Agama Islam dengan baik.

b. Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Keritang cukup maju, karena pada masa sekarang ini sudah banyak tempat pendidikan yang dibangun atau didirikan, baik Negeri maupun Swasta dibangun oleh pemerintah maupun oleh pihak Swasta yang peduli akan pentingnya pendidikan. Karena perhatian pemerintah yang baik terhadap pendidikan salah satunya dengan memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan bantuan kepada pelajar yang kurang mampu. Ada beberapa jumlah sarana pendidikan yang ada dikecamatan Keritang antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2

Sarana Pendidikan dikecamatan Keritang

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK	27
2	SD/MI	70
3	SMP/MTS	31
4	SMA/MA	10
Jumlah		138

Data : Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Sarana pendidikan di Kecamatan Keritang pada saat ini sudah mulai membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah yang cukup banyak dapat kita lihat bahwa kemajemukan masyarakat kecamatan Keritang dalam hal pendidikan cukup baik dan membanggakan, dilihat dari semangat orang tua dan anak untuk bersekolah sehingga sekarang ini banyak anak-anak dari Kecamatan Keritang yang melanjutkan keperguruan tinggi karena orang tua nya sudah mengerti betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.

C. Gambaran Umum Dinas Koperasi

Sejarah singkat Dinas Koperasi dan UKM untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara mendayaguna, khususnya

perkoperasian dan pengusaha kecil menengah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dibentuklah Dinas Koperasi dan UKM.

Memperhatikan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara No. 56/M.PAN/2/2000 tanggal 04 Februari 2000 perihal Pembentukan/Perintegrasian Instansi Vertical Departemen menjadi Dinas serta Dinas Koperasi dan Pengusaha.

Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.

Visi Misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Visi

Terwujudnya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang berkualitas berdaya saing dalam system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

2. Misi

- a. Memperdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.
- b. Mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan martabat daerah sesuai dengan semangat ekonomi.
- d. Mewujudkan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

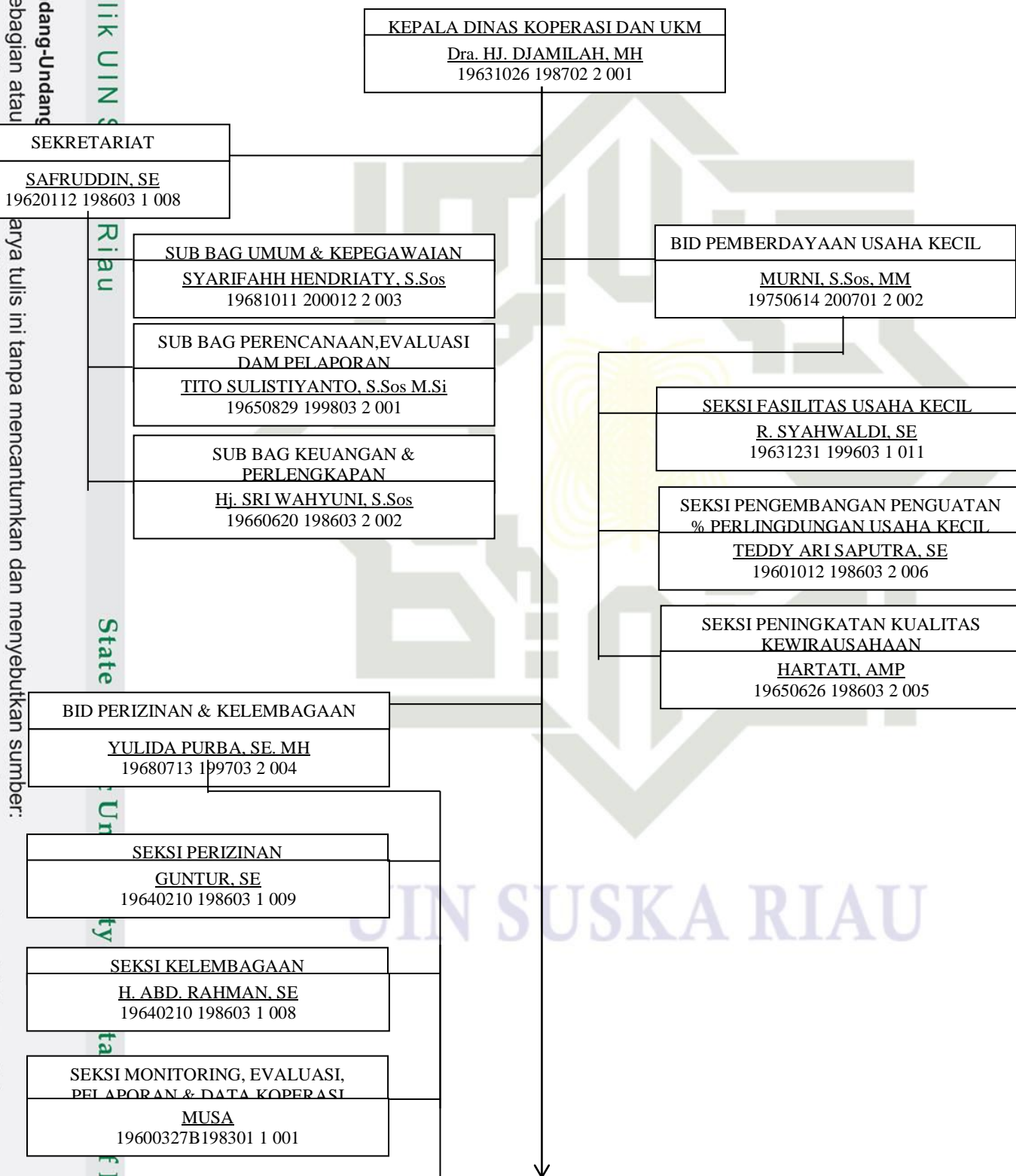
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

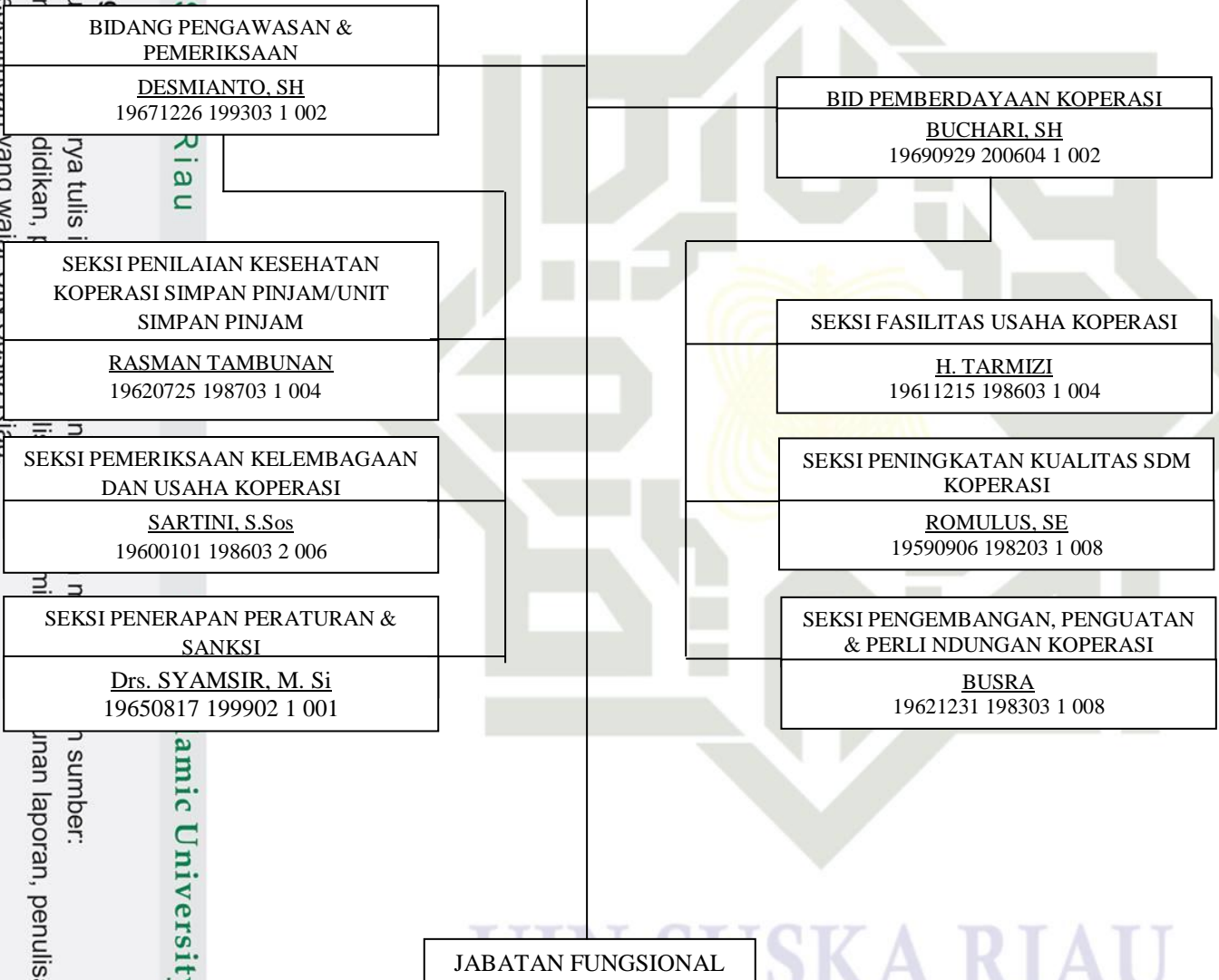
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.3

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- f. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
- g. Fasilitas pelaksanaan urusan bidang Pengawasan dan Pemeriksaan lingkup Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam, Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Dinas Koperasi

Wiryo Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *“the laws and not menshall govern”*.

Joeniarto memeberi definisi negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasa harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sudargo Gautama menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Soediman Kartohadiprodjo mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.²³

Tujuan pembentukan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk

²³ Bahder Johan Nasution, *“Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”*, (Bandung: CV. Mandar Jaya, 2012), Cet Ke-2, hlm. 1.

mencapai tujuan bersama,²⁴ dan perserikatan dari rakyat bersama-sama melindungi hak mereka masing-masing.²⁵ Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peranan penting di dalamnya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Secara filosofis pejabat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan terbawah mempunyai tanggung jawab yang beriringan. Disatu pihak pejabat daerah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan secara langsung.²⁷ Kebijakan pemerintahan tersebut bisa menentukan jalannya suatu organisasi dilapangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 1 ayat h, i, dan j Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi meliputi bahwa :²⁸

²⁴ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Total Media, 2007) hlm. 11.

²⁵ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010) hlm. 4.

²⁶ R Z. Abdoel Djamali, *Loc.cit*.

²⁷ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah (Prespektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan)*, (Malang, Setara Press, 2012) hlm. 5.

²⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
- c. tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangan daerah provinsi.

Dalam pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah yang dimana peran dari dinas koperasi tersebut sangat penting baik itu untuk kepentingan bagi kelancaran berjalannya suatu koperasi agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan terhadap koperasi-koperasi dan juga kepentingan perekonomian rakyat dan masyarakat. Menurut Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 yang berbunyi Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Koperasi dan UKM serta dapat melaksanakan wewenang yang diimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengenai Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:²⁹

- a. Kepala bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi pendaftaran dan hukum, seksi akuntabilitas dan pelaporan, dan seksi pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang penyelenggara fungsi:
 - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c) Penyelenggaraan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

²⁹ Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Pasal 21 Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengenai kepala seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :³⁰

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pengawasan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan

³⁰ *Ibid.*

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan

Hukum diciptakan untuk mengatur, agar terciptanya suatu keteraturan dalam masyarakat. Untuk itu suatu hukum akan efektif bila bekerja sesuai dengan fungsinya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum berfungsi sebagai :³¹

- a. Pengawasan/pengendalian sosial (*social control*);
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*); dan
- c. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Salah satu fungsi hukum adalah bertindak sebagai alat pengawasan atau kontrol sosial, dimana hukum akan bertindak untuk mengontrol pola perilaku masyarakat. Pengawasan memiliki pengertian yang luas. Secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling, evaluating, appraising, correcting* maupun *control*. Istilah pengawasan dalam bahasa Belanda disebut *toetsing* yang berarti pengujian, sedangkan dalam kamus istilah hukum, *Toetsing* diartikan lebih lanjut sebagai penelitian apakah perbuatan ataupun hal-hal sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi.³²

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang

³¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 10.

³² N.E Algra dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae*, Binacipta, Bandung, hlm. 571.

diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*Input*) yang digunakan.³³

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, tujuan pengawasan adalah sebagai berikut³⁴

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi oleh pemerintahan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi.
2. Meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Robert J. mockler memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.³⁵

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber

³³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Edisi Revisi, unit penerbit dan percetakan (PUP) AMP YPKN, Yogyakarta, 2005), hlm. 214-215.

³⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

³⁵ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (PT Rafika Aditama, Jakarta, 1999), hlm. 360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³⁶

Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.³⁷

Ditinjau dari perspektif hukum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha reventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan.

Disinilah letak inti atau hakikat dari suatu pengawasan.³⁸ Dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan terdiri dari:³⁹

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan;

³⁶ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (PT. Refika Aditama. Bandung, 2011), hlm. 176.

³⁷ Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Penerbit Refika Cipta, Jakarta, 1994), hlm. 20.

³⁸ Effendi Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, hlm. 15.

³⁹ Muhammad, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya koperasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta;
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan; dan
- e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (Input) yang digunakan.

Sebagai wujud dalam mencapai tujuan negara atau organisasi, menurut Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, pengawasan dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai hal, yaitu :⁴⁰

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

- 1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- 2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.

⁴⁰ Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Op., Cit*, hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

1) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan represif

Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (*inspeksi*), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Ekstern

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, sasaran pengawasan koperasi:⁴¹

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan
- c. Terwujudnya koperasi yang akuntabel.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, manfaat pengawasan bagi koperasi adalah untuk mendorong koperasi :⁴²

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi;
- c. Dalam menjaga dan melindungi aset koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh; dan
- f. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

⁴¹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

⁴² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, ruang lingkup pengawasan :⁴³

- a. Penerapan kepatuhan;
- b. Kelembagaan koperasi;
- c. Usaha simpan pinjam;
- d. Penelaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. Penerapan sanksi.

Selanjutnya Pasal 12 tentang Pejabat Pengawas Koperasi:

- a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Provinsi;
- b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 18 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, tujuan pengawasan tentang tindak lanjut hasil pengawasan koperasi meliputi :⁴⁴

- a. Rekomendasi dan pembinaan lebih lanjut;
- b. Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dalam pasal 18 dan pada ayat 1 huruf a, tidak bisa diperbaiki koperasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

⁴³ *Ibid.,*

⁴⁴ *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teguran tertulis paling sedikit 2 (dua) kali;
 2. Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus dan pengawas koperasi;
 3. Pencabutan izin usaha simpan pinjam, izin usaha lainnya dan/atau
 4. Pembubaran koperasi oleh menteri.
- c. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, menteri berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.⁴⁵

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

⁴⁵ Amran Suadi, *sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, (PT. Rajagrafindo: Jakarta, 2014), hlm. 16.

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁴⁶

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek paling penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁷ Dalam konteks ini pengawasan menjadi terhadap pemerintahan sama pentingnya dengan pengawasan terhadap suatu organisasi koperasi yang berbadan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi suatu penyelewengan dan penyimpangan.

Tujuan pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸*ibid.*, hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi belum sepenuhnya terlaksana. Dinas Koperasi memiliki beberapa tugas pokok yang diantaranya, merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang koperasi serta pengembangan usaha kecil menengah didaerah, pembinaan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah serta peningkatan peranan dan kemampuan usaha kecil menengah, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau. Berdasarkan data yang penulis dapat di lapangan bahwa pihak dinas memang belum ada memberikan pembinaan dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Keritang, kemudian evaluasi terhadap jalannya perkoperasian dan struktural koperasi tersebut, sehingga pihak dinas masih kurang tau mengenai jalannya perkoperasian dan sistem pengangkatan struktural keanggotaan yang dijalankan oleh pihak koperasi yang ada di Kecamatan Keritang, hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di karenakan pihak dinas koperasi hanya menilai dan mengevaluasi berdasarkan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) saja. Disisi lain dinas koperasi perlu menjelaskan atau melakukan pelatihan terhadap pendirian serta pelaksanaan dan tugas ataupun fungsi disetiap keanggotaan koperasi tentang aturan yang berlaku terhadap organisasi koperasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, karena berdasarkan hasil data yang penulis dapat di lapangan masih banyaknya pengurus serta pengawas koperasi yang tidak paham akan fungsi dan tugas dari pengurus dan pengawas serta anggota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

2. Adapun kendala ataupun Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Dinas koperasi yaitu adalah Sumber daya manusia dari dinas koperasi dan usaha kecil menengah tidak memadai ditambah kurangnya anggaran untuk dinas koperasi dalam suatu daerah untuk turun kelapangan dalam memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap koperasi yang ada dalam masyarakat. sehingga hal ini berdampak kepada jalannya roda perkoperasian yang kurang efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pendirian suatu organisasi koperasi perlu dilakukan suatu pembinaan/pelatihan mengenai kestruktural dan tata cara berkoperasi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sehingga tidak ada lagi dari setiap keanggotaan perkoperasian yang tidak paham akan tugas dan fungsi dari bidangnya masing-masing.

2. Kemudian pengawasan pun haruslah lebih ditingkatkan, perlu adanya pengawasan secara ketat dalam pengangkatan kepengurusan koperasi oleh pihak dinas koperasi dan tindakan yang tegas dalam melakukan sanksi terhadap koperasi yang tidak berjalan sesuai aturan agar terciptanya koperasi yang sehat, berguna, dan tertib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhanuddin, 2013, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang
- Djamali R. Abdoel, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Radjawali Pers, Jakarta
- Effendi Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta
- Ellydar Chaidir, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Jakarta
- Hadhikusuma R.T. Sutantya Rahardja, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hakim Lukman , 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah (Prespektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan)*, Setara Press, Malang
- Hani Handoko , 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditam, Jakarta
- Hendrojogi, 2004, *Koperasi:Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hendrojogi, 2007, *Koperasi:Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ishaq , 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Johan Nasution Bahder, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Jaya, Bandung
- Makmur , 2011, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YPKN, Yogyakarta
- N.E Algra dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae*, Binacipta, Bandung
- Sari Iin Kumira , *Tentang Pengawasan*, Jurnal Hukum, Pekanbaru, 2013
- Soewdji Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Witra Wacana Media, Jakarta
- Suadi Amran, 2014, *sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Subandi, 2015, *Ekonomi Koperasi: Teori Dan Praktik*, Alfabeta, Bandung
- Sudarsono Dan Edilius, 2001, *Managemen Koperasi Indonesia*, Bineka Cipta, Jakarta
- Sudikmomeertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sunggoro Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hokum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggoro Bambang, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Triwulan Titik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta

Zainal Asikin dan Amirudin, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

C. Jurnal

Sari Iin Kumira, 2013, *Pengawasan kantor bea dan cukai tipe A kota Dumai terhadap penyelundupan barang berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai*, Skripsi, program sarjana universitas islam negeri sultan syarif kasim Riau.

D. Internet

<http://info.metrokota.go.id/dinas-koperasi-umkm-dan-perindustrian/>,

diakses, pukul 09:55, Tanggal 28 Maret 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

DINAS KOPERASI

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap koperasi yang sedang berjalan sekarang?
2. Apakah ada koperasi yang berjalan tidak sesuai aturan?
3. Bagaimana sistem pengawasan dari dinas koperasi terhadap koperasi?
4. Berapa orang biasanya yang turun kelapangan dalam melakukan pengawasan?
5. Bagaimana cara yang dilakukan oleh dinas koperasi dalam meningkatkan kualitas koperasi?
6. Apakah sudah dilakukan pelatihan atau penyuluhan terhadap koperasi?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi jika terjadi kesalahan terhadap koperasi?

KETUA KOPERASI

1. Apakah ada pihak dinas koperasi yang turun langsung mengawasi jalannya roda perkoperasian?
2. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi terhadap koperasi yang bersangkutan?
3. Bagaimana sistem pengangkatan kepengurusan koperasi?
4. Bagaimana sistem pembuatan RAT pada koperasi yang bersangkutan?
5. Apakah ada penyuluhan atau pelatihan yang dilakukan oleh dinas koperasi?
6. Apakah bapak/ibu tau tentang tugas dari anggota, pengurus, serta pengawas koperasi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG*, yang ditulis oleh :

Nama : **Putra Yoga**
NIM : 11527104863
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Nur Hidayat, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Kepala Subbagian
Akademik Kemahasiswaan
Dan Alumni
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. N A M A | : Putra Yoga |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11527104863 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Pelaksanaan pengawasan koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan uu no 25 tahun 1992 di kubu indragiri hilir |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Kamis / 11 Juli 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Ilham Akbar, S.H., M.H.

Catatan :
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI OLEH
DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG, ditulis oleh saudara :

Nama : PUTRA YOGA
NIM : 11527104863
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 11 Juli 2019
Nara sumber : ILHAM AKBAR, SHI, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kabag Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 12 Juli 2019

Narasumber

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002

ILHAM AKBAR, SHI, SH, MH
NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8081/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRA YOGA
N I M : 11527104863
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **15 AGUSTUS 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 9 Oktober 2019

Dekan,


DR. Drs. H. Hajar, M. Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7351/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.06 September 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRA YOGA
NIM : 11527104863
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Indragiri hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan pengawasan terhadap pengurus koperasi oleh dinas koperasi berdasarkan
Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 di kabupaten Indragiri Hilir kecamatan keritang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1/005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/25872
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/7351/2019 Tanggal 6 September 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

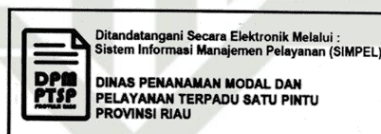
- Nama : **PUTRA YOGA**
- NIM / KTP : **11527104863**
- Program Studi : **ILMU HUKUM**
- Jenjang : **S1**
- Alamat : **PEKANBARU**
- Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGURUS KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG**
- Lokasi Penelitian : **DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 September 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/25872 Tanggal 10 September 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Pra-Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **PUTRA YOGA**
NIM : 11527104863
Program studi/Jenjang : Ilmu Hukum / S1
Alamat : Jl. Datuk Ayib Kelurahan Pengalihan Kecamatan Keritang
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGURUS KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG**
Lokasi Penelitian : **DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 3 Oktober s/d 3 Januari 2020.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 3 Oktober 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid. Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing



KAMALUDDIN
Pembina
NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Gedung Eks Multiyears (Lantai 1) Jl. Swarna Bumi Email diskopinhil@gmail.com

TEMBILAHAN**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 514 / Diskop.UKM / 1.2 /XII/2019

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, No : 070/BKBP-POLMAS/2019/292 tanggal 03 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey), dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: PUTRA YOGA
NIM	: 11527104863
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Program Studi/Jenjang	: Ilmu Hukum / S.I
Universitas	: UIN Suska Riau
Alamat	: Jln. Datuk Ayib Kelurahan Pengalihan Kecamatan Keritang

Telah melakukan penelitian serta pengumpulan data yang akan dijadikan bahan pembuatan skripsi guna menyelesaikan studinya ditingkat akhir dengan judul "**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGURUS KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tembilahan, 17 Desember 2019

An. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 Sekretaris,



SAFRUDDIN, SE

NIP. 19651018 199703 1 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JURNAL HUKUM ISLAM**

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **PUTRA YOGA**

NIM : **11527104863**

Program Studi: **ILMU HUKUM**

Judul : *Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang*

Pembimbing : **Muslim, S.Ag., SH., M.Hum**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 498804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis bernama Putra Yoga, biasa dipanggil Yoga, penulis Lahir didesa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 September 1997. Penulis merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara. Adik yang bernama Rio Pranata, Ayah yang bernama Arifin dan Ibu Yusmida.

Penulis mendapatkan pendidikan formal pertama kali di SDN 010. Pengalihan. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Pengalihan Kemudian melanjutkan SMK Negeri 1 Teluk Kuantan. Kemudian tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan juga telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Tanggal 14 Juli s/d 30 Agustus 2018. Penulis mengikuti Sidang Munaqasyah yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU pada hari Senin 06 Januari 2020 dengan judul **"Pelaksanaan Pengawasan Koperasi Oleh Dinas Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Keritang"** dan dinyatakan lulus memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) . Semasa menjadi mahasiswa, Penulis Pernah menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM) Fakultas pada tahun 2017-2018. Kemudian juga tercatat sebagai salah satu penggagas dan pendiri Forum Mahasiswa Pengalihan Keritang (FORMAPEKA Pekanbaru) pada tahun 2019-2021. Selanjutnya menjadi Wakadep Hukum dan Ham Laskar Melayu Riau cabang Kecamatan Keritang Periode 2019-2024.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb